

PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

Virdianti Nurazizza¹⁾, M.Agus Sudrajat²⁾,

¹Universitas PGRI Madiun

virdiantinurazizza@gmail.com

²Universitas PGRI Madiun

agus.sudrajat@unipma.ac.id

Abstract

The goal of this study is to determine how internal control, financial accounting systems, transparency, and accountability affect the performance of the Regional Financial Board of the Ngawi Regency. This study was carried out in the Ngawi Regency's Regional Finance Board office. A questionnaire was issued using the Google form link, and a sample of 55 participants who worked at the Ngawi Regency Regional Finance Agency office completed it. Multiple regression analysis on primary data using SPSS version 26 is the quantitative research methodology used. According to the research's conclusions, internal control, financial accounting systems, transparency, and accountability have a direct impact on how well regional financial institutions perform in Ngawi Regency. This study is still not perfect in several areas. A study on the impact of internal control, financial accounting systems, openness, and accountability on the operationalization of regional financial institutions in Ngawi Regency, for instance, lacks sufficient references.

Keywords: *Accountability, transparency, internal controls, and performance of local financial institutions in Ngawi District.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan, transparansi, dan akuntabilitas terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi. Kajian ini dilaksanakan di kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi. Kuesioner dikeluarkan dengan menggunakan Google form link, dan sampel 55 peserta yang bekerja di kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi mengisinya. Analisis regresi berganda pada data primer dengan menggunakan SPSS versi 26 merupakan metodologi penelitian kuantitatif yang digunakan. Berdasarkan kesimpulan penelitian, pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan, transparansi, dan akuntabilitas berdampak langsung terhadap kinerja lembaga keuangan daerah di Kabupaten Ngawi. Penelitian ini masih belum sempurna di beberapa daerah. Kajian tentang dampak pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan, keterbukaan, dan akuntabilitas terhadap operasionalisasi lembaga keuangan daerah di Kabupaten Ngawi, misalnya, kurang memiliki referensi yang memadai.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, transparansi, pengendalian internal, dan kinerja lembaga keuangan daerah di Kabupaten Ngawi.*

PENDAHULUAN

Aturan-aturan yang mengatur tentang otonomi daerah telah menimbulkan beberapa dampak sejak munculnya era desentralisasi, salah satunya adalah terbentuknya variasi daerah, khususnya dalam hal kemampuan daerah, dimana masing-masing daerah berhak mengatur keuangannya sendiri (Khusaini, 2018). Keuangan daerah dengan demikian merupakan salah satu indikator kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Keuangan daerah didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta setiap kekayaan yang dapat dimiliki oleh daerah dalam uang dan hasil yang diperlukan untuk pelaksanaannya. hak dan kewajiban.

Menurut pemerintah daerah, keuangan daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan mengelola sumber daya keuangan daerah secara lebih efektif dan efisien (Khusaini, 2018). Sebuah departemen atau badan lain bertugas mengelola keuangan di setiap daerah. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Keuangan adalah organisasi daerah yang mengkoordinasikan dukungan sektor keuangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dijalankan oleh Kepala Badan, yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Keuangan Daerah bermaksud untuk meningkatkan pemerataan otonomi daerah ke seluruh daerah karena Daerah Ngawi akan menjadi subyek kajian. Sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, Lembaga Keuangan juga bertugas mengelola pendapatan, keuangan, kekayaan, dan fungsi lain yang ditugaskan oleh Bupati. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2022 yang mengatur tentang fungsi, pertanggungjawaban, dan susunan organisasi entitas keuangan. Untuk mencapai tujuan lembaga keuangan, kinerja keuangan harus ditingkatkan.

Kinerja keuangan merupakan evaluasi berkala atas keberhasilan operasional perusahaan karyawan sesuai dengan tujuan, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan (Mulyadi, 2007). Dasar pemikiran di atas mengarah pada kesimpulan bahwa kinerja keuangan suatu daerah merupakan salah satu indikasi kemampuan daerah tersebut dalam menjalankan otonomi daerah (Esni, 2019). Kinerja yang baik dimungkinkan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam administrasi dan penyampaian layanan.

Badan keuangan Kabupaten Ngawi menghadapi keterbatasan kinerja keuangan, sehingga perlu adanya komitmen sebagai reminder kepada pimpinan daerah akan perlunya tindak lanjut hasil audit untuk digunakan dalam mewujudkan perubahan pengelolaan keuangan daerah. Laporan harus diserahkan

dalam waktu 60 hari sejak Anda menerima surat tersebut. Bupati Ngawi Ony Anwar melaporkan realisasi Pajak Bumi, Bangunan, dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Ngawi turun Rp 18,6 miliar atau sekitar 72% dari target awal Rp 26 miliar. Batas akhir pelaporan pajak adalah 30 September 2021. Ia mengakui hal itu terjadi akibat realisasi yang kecil; Saat ini baru Kecamatan Geneng dan Gerih yang sudah mencapai 28,25 persen (harian7.com 2022).

Terjadinya fenomena tersebut merupakan salah satu permasalahan dengan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi yang selalu berada di bawah rata-rata. Hal-hal tersebut harus dicermati dan dicari cara pemecahan masalah yang paling efektif agar kinerja lembaga keuangan daerah dapat ditingkatkan dan dikelola secara efektif dan efisien sehingga dapat beroperasi sesuai dengan sistem pemerintahan daerah.

Elemen awal yang perlu mendapat perhatian adalah pengawasan intern. Pertiwi (2015) mengklaim bahwa pengawasan internal adalah prosedur audit, review, pemantauan, dan penilaian yang komprehensif. Pengawasan intern diperlukan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang handal. Sasaran pengawasan internal merupakan temuan yang menunjukkan penyimpangan dari suatu sasaran (Hermadisya, 2020).

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang mendefinisikan sistem sebagai rangkaian langkah-langkah yang dapat dilakukan secara manual atau dengan bantuan komputer dan dimulai dengan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan diakhiri dengan pelaporan keuangan yang dilakukan dalam kerangka akuntabilitas pelaksanaan APBD, sistem akuntansi keuangan daerah merupakan unsur kedua yang perlu mendapat perhatian. Untuk meringkas berbagai operasi yang terkait, akuntansi keuangan daerah digunakan sesuai dengan aturan dan peraturan yang ada untuk memberikan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Yohannes Suharjo, 2019). Penggunaan akuntansi keuangan daerah sangat penting dalam penyediaan data mengenai operasi dan kinerja keuangan daerah dalam rangka mendorong keterbukaan dan akuntabilitas (Priscilla, 2022).

Berdasarkan anggapan bahwa publik berhak mengetahui secara total dan jujur bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya alam, transparansi dianggap mampu menunjukkan fakta keuangan yang terbuka dan jujur. (Aprianti & Asyik, 2020). Dengan keterbukaan informasi, pemerintah dapat membedakan mana yang harus dipublikasikan dan mana yang tidak. Standar informasi yang dapat diberikan dan penerima informasi tersebut telah ditetapkan oleh pejabat publik. Hal ini harus dilakukan agar semua data tidak menjadi dasar generalisasi (Elkha&Wahidahwati, 2020).

Komponen keempat adalah akuntabilitas. Menurut Lukito (2014),

penanggung jawab urusan publik memiliki tanggung jawab untuk dapat menjelaskan dan bereaksi terhadap pertanyaan tentang langkah-langkah yang diambil dalam semua keputusan dan proses, serta bertanggung jawab atas hasil dan kinerja. Akuntabilitas diperlukan untuk menjamin bahwa setiap badan dan pejabat pemerintah melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, setiap penyelenggara negara harus melaksanakan tugasnya dengan jujur, cakap, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Apriyanti & Asyik, 2020).

Menurut penelitian sebelumnya Silvana Aprianti dan Nur Fadjrih Asyik (2020), transparansi dan pengawasan juga tampaknya berdampak baik pada efektivitas pengelolaan anggaran, sedangkan akuntabilitas tampaknya berdampak positif pada kinerja instansi pemerintah. Peneliti menambahkan Sistem Akuntansi Keuangan sebagai variabel kedua untuk analisis mereka. Kajian tersebut didukung oleh penelitian Utami Puji Lestari & Mutoriogh (2020) yang menunjukkan kesimpulan penelitian yaitu bahwa kinerja pemerintah daerah secara signifikan dipengaruhi oleh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi.

Berdasarkan konteks dan kejadian yang terjadi saat ini, peneliti bermaksud untuk meneliti -Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Badan Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawil.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Transparansi

Transparansi melibatkan keterbukaan dengan informasi dan substansi yang relevan, serta bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan. Masyarakat diberi kesempatan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui tata kelola yang transparan (Priscilla & Taufik, 2022). Pemantauan pemerintah menjadi lebih mudah dengan transparansi sektor administrasi keuangan, dan pengawasan dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan menginspirasi staf untuk bekerja lebih sukses dan efisien. Pendapat ini sejalan dengan pernyataan Umar et al. (2018) bahwa kinerja pemerintah daerah secara signifikan dipengaruhi oleh transparansi. Transparansi, dari sudut yang berbeda, adalah keterbukaan informasi public tentang pemerintah yang memudahkan Masyarakat untuk mendapatkan informasi akurat dan memadai (Agus Dwiyanto, 2006:80). Transparansi menekankan bahwa organisasi keuangan jujur dan terbuka saat mengungkapkan informasi tentang praktik mereka,

memungkinkan mereka berfungsi secara legal dan lebih efektif.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kapasitas organisasi untuk mengenali, menerima, dan bertanggung jawab atas perannya dalam manajemen bisnis. Akuntabilitas, menurut Indraswari dan Rahayu (2002), adalah kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang berhak menuntutnya atas kinerja, pilihan, dan/atau tindakan suatu perusahaan atau organisasi. Tujuan laporan keuangan publik adalah untuk menyediakan, menyajikan, dan melaporkan kegiatan pertanggungjawaban. Manajemen keuangan terpadu dan pengawasan penggunaan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien di semua aspek tata kelola adalah tugas pertama yang konsep akuntabilitas telah diperluas untuk dianut.

Akuntabilitas, menurut penelitian (Elliyana et al., 2021), adalah sarana untuk mempertanggungjawabkan bagaimana seseorang menggunakan wewenangnya, memastikan bahwa wewenang tersebut digunakan dengan sukses untuk kepentingan perusahaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Agar dapat dimintai pertanggungjawaban, lembaga publik harus mengelola secara efektif dan efektif. Setiap prosedur harus diperhitungkan untuk mencegah inkonsistensi di dalam perusahaan. Akuntabilitas memerlukan penentuan apakah strategi yang dibuat sebelumnya akan memungkinkan tujuan tercapai. Akuntabilitas menciptakan pilihan terbesar dengan mempertimbangkan alternatif yang tidak mahal.

Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang pertama mencatat, mengkategorikan, dan merangkum data untuk membuat laporan keuangan, merupakan sistem yang mengendalikan transaksi anggaran dan realisasinya. Sistem akuntansi memproses transaksi anggaran dan realisasinya untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran yang unggul. Menurut Mulyadi (2013: 3), sistem akuntansi adalah kumpulan dokumen, catatan, dan laporan yang terstruktur dengan baik yang mengomunikasikan persyaratan untuk mengelola data keuangan yang berbeda yang diperlukan untuk perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengelolaan, serta untuk merumuskan dan membuat keputusan tentang kebijakan dan menilai efektivitas pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Serangkaian prosedur terkait harus diikuti sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memberikan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pembuat keputusan internal dan eksternal sebagai dasar. Prosedur-prosedur ini digariskan oleh sistem akuntansi keuangan itu sendiri. (John&Suharjo, 2019). Sistem akuntansi keuangan harus digunakan oleh Badan

keuangan untuk semua operasi, mulai dari transaksi hingga pelaporan, untuk memastikan efisiensi dan akurasi.

Pengawasan Internal

Pengendalian internal mengacu pada pengawasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam unit organisasi yang bersangkutan (Feriyanto, 2015:64–65). Terlepas dari anggaran, proses, atau otoritas yang terlibat, tujuan pengawasan adalah untuk menghilangkan kemungkinan penipuan atau anomali. Pengendalian internal digunakan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hasil yang berpotensi tidak terduga. Selain itu, kontrol internal dapat meningkatkan output, menghentikan kehilangan aset, meningkatkan tingkat keandalan data dalam pelaporan keuangan, dan mendorong kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan saat ini.

Hal ini didukung oleh penelitian (Muafik & Susanti, 2021) yang menunjukkan bahwa sistem pengawasan intern berdampak signifikan terhadap kinerja pemerintah, khususnya pemerintah kota. Menurut Niswonger (1999:183), pengawasan internal adalah prosedur dan kebijakan yang memastikan bahwa aturan dan peraturan harus diikuti dengan benar, aset dilindungi dari penyalahgunaan, dan informasi perusahaan akurat.

Kinerja Keuangan Daerah

Tolok ukur kinerja keuangan digunakan untuk menentukan apakah operasi beroperasi secara efektif atau tidak. Kinerja keuangan adalah hasil akhir dari upaya tim manajemen untuk mengelola aset Perusahaan secara efektif selama periode waktu tertentu.

Perusahaan memerlukan kinerja keuangan untuk dapat menentukan dan menilai tingkat keberhasilannya berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilakukan (Elkha & Wahidahwati, 2020). Menurut sudut pandang yang berbeda, kinerja keuangan suatu lembaga adalah pencapaiannya selama periode waktu tertentu, yang menunjukkan situasi keuangannya (Jatmiko, 2020). Hanya pemerintah daerah yang memiliki kinerja keuangan yang baik yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena tanpa uang, kegiatan pembangunan dan pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara efisien. Kapasitas suatu daerah untuk mengidentifikasi dan mengelola sumber daya keuangan yang diciptakan oleh daerah untuk memenuhi kebutuhannya ditunjukkan oleh kinerja keuangan pemerintah daerah, di sisi lain. Akibatnya, suatu wilayah dapat mempertahankan operasi sistem politiknya, layanan publik berkualitas tinggi, dan pertumbuhan regional tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah federal, dan dapat menggunakan kebebasannya untuk membelanjakan uang untuk kepentingan Masyarakat local di dalam wilayahnya. Batasan yang telah ditetapkan. Menurut beberapa definisi di atas, keberhasilan keuangan daerah merupakan tanda

kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah. (Jatmiko, 2020). Apabila pengelolaan dan pemberian pelayanan oleh Badan Keuangan Daerah mengikuti perencanaan sebelumnya, maka kinerja yang baik seperti yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah dapat tercapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif khusus. Data utama dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung melalui kuesioner. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung atau pengisian kuesioner di kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi. Untuk mengumpulkan sampel untuk penyelidikan ini, pengambilan sampel yang disengaja dilakukan. Sebagai sampel penelitian, dipekerjakan 80 pegawai dari kantor lembaga keuangan daerah di Kabupaten Ngawi. Namun, 55 karyawan dipekerjakan sebagai responden dan memenuhi kriteria penelitian. Penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai alat ukurnya.

Variabel terikat penelitian adalah kinerja badan keuangan daerah (Y), dan variabel bebasnya adalah pengendalian intern (X1), sistem akuntansi keuangan (X2), transparansi (X3), dan tanggung jawab (X4). Metode analisis penelitian yang digunakan adalah: uji parsial (uji-t), uji koefisien determinasi (r^2), analisis regresi berganda, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Paragraf berikut akan memaparkan analisis penelitian tentang -Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari tanggapan responden survei. Tanggapan yang diberikan oleh responden akan digunakan sebagai informasi untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang baru-baru ini diajukan dan dipublikasikan.

1. Distribusi kuesioner

Kantor Badan Keuangan Daerah dalam penelitian ini memiliki sekitar 80 pegawai, namun atas permintaan langsung, Badan Keuangan Daerah menempatkan dan memberikan sebanyak 55 orang untuk dijadikan responden dan menyampaikan informasi untuk kuesioner penelitian. Sesuai dengan persyaratan keikutsertaan dalam survei, responden harus berasal dari kalangan internal (yaitu pegawai di lingkungan kantor Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi), pegawai menengah dan atas. Batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan kuesioner ini bervariasi sekitar satu minggu.

2. Responden Menurut Jenis Kelamin

Mengenai temuan kuesioner yang berasal dari 55 responden, menunjukkan berupa jenis kelamin masing-masing responden. Responden berdasarkan jenis kelamin yang ada dalam tabel 4.1 dijelaskan secara lengkap di bawah ini.

Tabel 4.1 Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	33	60 %
Perempuan	22	40 %
Total	55	100 %

Sumber: hasil olah data, 2023

Tabel 4.1 memperlihatkan bagaimana tanggapan dibagi menjadi dua kelompok, laki-laki dan perempuan. Sebanyak 33 responden, atau 60% dari seluruh responden, adalah laki-laki, sedangkan hingga 22 responden, atau 40% dari seluruh responden, adalah perempuan. Dengan total 33 responden, dapat dikatakan bahwa mayoritas responden penelitian adalah laki-laki.

3. Responden Sesuai Usia

Mengenai temuan kuesioner yang berasal dari 55 responden, informasi yang dikumpulkan berupa usia responden. Responden berdasarkan usia yang tercantum dalam tabel 4.2 dijelaskan secara lengkap di bawah ini

Tabel 4.2 Responden Sesuai Usia

Rentang Usia	Frekuensi	Persentase
20-30 tahun	24	43,7 %
31-40 tahun	18	32,8 %
41-50 tahun	11	20 %
>50 tahun	2	3,6 %
Total	55	100 %

Sumber: hasil olah data 2023

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden dibagi menjadi empat kelompok umur: 20–30 tahun, 31–40 tahun, 41–50 tahun, dan >50 tahun. Proses pengumpulan data menghasilkan 24 partisipan dengan rentang usia 20–30 tahun, 18 partisipan dengan rentang usia 31–40 tahun, 11 partisipan dengan rentang usia 41–50 tahun, dan 2 partisipan dengan rentang usia >50 tahun. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar peserta studi—43,7%—berusia antara 20 dan 30 tahun.

4. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Responden

Mengenai temuan kuesioner yang berasal dari 55 responden, informasinya berupa tingkat Pendidikan. Profil lengkap responden disediakan di bawah ini. Tabel 4.3 menunjukkan bagaimana responden dibagi menjadi tiga kelompok: SMA/SMK, diploma 3, dan strata 1.

Tabel 4.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Responden

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SMA/SMK	10	18, 2 %
Diploma 3	10	18, 2 %
Strata 1	35	63, 6 %
Total	55	100 %

Sumber: hasil olah data, 2023

Hasil pendataan diperoleh 35 mahasiswa S1, 10 mahasiswa diploma 3, dan 10 SMA/SMK. Total seluruh responden yaitu 55 orang, sehingga mampu ditarik sebuah kesimpulan bahwa mayoritas peserta penelitian memiliki tingkat pendidikan strata 1.

5. Responden Menurut Lama Bekerja

Mengenai temuan kuesioner, informasi tentang durasi kerja dikumpulkan dari 55 responden. Berdasarkan lama kerja yang tercantum dalam tabel 4.4, jawaban selengkapnya diuraikan di bawah ini.

Tabel 4.4 Responden Menurut Lama Bekerja

Lama Bekerja	Frekuensi	Persentase
1-5 tahun	23	41,8 %
6-10 tahun	13	23,6 %
11-15 tahun	11	20 %
>15 tahun	8	14,6 %
Total	55	100 %

Sumber: hasil olah data, 2023

Tabel 4.4 menghasilkan bahwa responden dibagi menjadi empat kelompok berdasarkan usia mereka: 1 sampai 5 tahun, 6 sampai 10 tahun, 11 sampai 15 tahun, dan >15 tahun. Pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui berapa orang yang bekerja selama 1 sampai 5 tahun, sampai 23, 6 sampai 10 tahun, sampai 13, 11 tahun, sampai 15, dan sampai 8 tahun. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta studi memegang pekerjaan hingga 23 orang dalam 1-5 tahun sebelumnya.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Reaksi yang mendekati ambang batas normal atau memiliki distribusi data normal dianggap memenuhi syarat. Menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk menilai apakah data dalam penelitian ini normal atau tidak, temuan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov ditunjukkan di bawah ini.

Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,56167296
Most Extreme Differences	Absolute	,096
	Positive	,086
	Negative	-,096
Test Statistic		,096
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber data: diolah spss 26

Jika data residual tidak berdistribusi normal, ditentukan dengan menggunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Manfaat dari pengujian ini adalah untuk mengumpulkan data yang lebih tepat dan menetapkan normalitas dari persamaan regresi yang digunakan. Persamaan dianggap normal jika nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas informasi dari 55 responden seperti terlihat pada tabel 4.16 di atas berdistribusi normal.

Analisis Regresi Berganda

Pengujian parsial variabel dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil uji regresi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,661	1,674		3,383	,001
	Pengawasan Internal	,201	,070	,267	2,862	,006
	Sistem Akuntansi Keuangan	,201	,070	,317	2,866	,006
	Transparansi	,055	,076	,081	,728	,470
	Akuntabilitas	,334	,109	,402	3,053	,004

Sumber: Data diolah SPSS 26

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 4.18 Hasil Uji t

Model		T	Sig
1	(Constant)	3,383	,001
	Pengawasan Internal	2,862	,006
	Sistem Akuntansi Keuangan	2,866	,006
	Transparansi	,728	,470
	Akuntabilitas	3,053	,004

Sumber: data diolah SPSS 26

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas model regresi berpengaruh terhadap variabel terikat yang berbeda satu sama lain. Hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan signifikansi parameter yang dibuktikan dengan menggunakan tingkat signifikansi (5%). H0 diterima jika nilai signifikansi uji t lebih besar dari 0,05 dan ditolak jika lebih kecil dari 0,05.

Hasil pengujian hipotesis 1. Berdasarkan tabel 4.18 di atas diketahui

bahwa pengawasan internal signifikan sebesar 0,006 dan memiliki ambang batas signifikansi di bawah 0,05 ($0,006 < 0,05$). Seperti terlihat dari nilai signifikansi tabel tersebut, pengendalian intern penting dan berpengaruh positif terhadap kinerja lembaga keuangan daerah. Hasilnya, dapat disimpulkan bahwa asumsi 1 (H1) benar. Dengan kata lain, pengendalian intern mempengaruhi seberapa baik kinerja lembaga keuangan daerah.

Berdasarkan informasi pada tabel 4.18 di atas, hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan nilai sig sebesar 0,006, yang berarti sistem tersebut memiliki nilai sig kurang dari 0,05 ($0,006 < 0,05$). Kesimpulan ini dapat diambil karena signifikansi pada tabel tersebut positif, yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan penting dan berdampak baik terhadap kinerja lembaga keuangan daerah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 (H2) benar. Dengan kata lain, sistem akuntansi keuangan berdampak pada seberapa baik kinerja lembaga keuangan daerah.

Hasil uji hipotesis 3. Transparansi memiliki nilai sig 0,728 yang lebih besar dari 0,05 ($0,728 > 0,05$), sesuai tabel 4.18 di atas. Signifikansi positif ditemukan pada tabel, menunjukkan bahwa meskipun transparansi tidak signifikan, hal itu mempengaruhi seberapa baik kinerja lembaga keuangan daerah. Hasilnya, dapat disimpulkan bahwa hipotesis tiga (H3) tidak terdukung. Dengan kata lain, keterbukaan berdampak kecil pada efektivitas lembaga keuangan lokal.

Hasil uji hipotesis 4. Akuntabilitas memiliki tingkat signifikansi 0,004, yaitu lebih dari 0,05 ($0,004 < 0,05$), sesuai tabel 4.18 di atas. Terlihat dari relevansi tabel tersebut bahwa akuntabilitas berpengaruh baik terhadap kinerja badan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 (H4) adalah benar. Dengan kata lain, efektivitas lembaga keuangan daerah dipengaruhi oleh akuntabilitas.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui besar faktor independen (pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan, transparansi, dan akuntabilitas) dapat menjelaskan variabel dependen (kinerja badan keuangan daerah). Berikut adalah hasil pengujian koefisien determinasi.

Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,883 ^a	,780	,762	1,05694
a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas , Pengawasan Internal , Sistem Akuntansi Keuangan , Transparansi				

Sumber: Data diolah SPSS 26

Hasil pengukuran koefisien determinasi dan berbagai koefisien korelasi menunjukkan nilai R sebesar 0,883. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang cukup besar antara faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Keuangan Daerah karena lebih dari 0,05. Berdasarkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,762 atau 76,2%, pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan, transparansi, dan akuntabilitas dapat menjelaskan karakteristik kinerja Badan Keuangan Daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk lebih memahami bagaimana pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan, transparansi, dan akuntabilitas mempengaruhi kinerja badan keuangan daerah di Kabupaten Ngawi, penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor tersebut. Berdasarkan analisis dan pengumpulan data, serta dengan menguji data yang telah dibuat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Nilai pengawasan internal sebesar 2,862 menunjukkan bahwa pengawasan internal memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05 ($0,006 < 0,05$) bila digunakan untuk mengevaluasi hipotesis nol hasil uji t. Hal ini menunjukkan bagaimana hasil pengujian berdampak pada kinerja BKD Kabupaten Ngawi. Ketika sistem akuntansi keuangan diuji terhadap hipotesis temuan t-test, hasil signifikan 0,006 menunjukkan bahwa sistem memiliki signifikansi kurang dari 0,05 ($0,006 < 0,05$). Artinya menunjukkan bagaimana hasil pengujian berdampak pada kinerja BKD Kabupaten Ngawi. Keterbukaan dalam mengevaluasi hipotesis temuan uji t adalah 0,728, dan signifikansi 0,470 menunjukkan bahwa memiliki nilai lebih dari 0,05 ($0,470 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengujian tidak berdampak pada kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi. Ketika mengevaluasi hipotesis berdasarkan hasil uji t, signifikansi 0,004 menunjukkan bahwa signifikansi akuntabilitas kurang dari 0,05 ($0,004 < 0,05$), dan akuntabilitas dalam hal ini adalah 3,053. Hal ini menunjukkan bagaimana hasil pengujian berdampak pada kinerja BKD Kabupaten Ngawi.

Peneliti berharap bahwa penyelidikan lebih lanjut akan menghasilkan hasil penelitian yang lebih berkualitas. Peneliti memberikan saran variabel tambahan, seperti variabel moderasi, variabel intervening, dan sebagainya yang sebaiknya dimasukkan oleh peneliti selanjutnya. Disarankan juga untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna memperluas sampel penelitian dan populasi. Dengan sampel yang lebih beragam, diyakini dapat diperoleh hasil yang lebih baik dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Antika, Z., Murdayanti, Y., & Nasution, H. (2020, Desember). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akseibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 15, 212-232. doi:<https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>
- Aprianti, S., & Asyik, N. F. (2020, Desember). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9, 1- 21.
- Batubara, Z., & Risna, R. (2020, Juni). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4, 95-109. doi:<https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.221>
- Brata, I. O., Arnan, S. G., & Suharsono, L. (2019). The Effect of use of Regional Financial Accounting Systems (SAKD) and Government Internal Control System (SPIP) on the Quality of Regional Government Financial Statements (Survey on West Bandung District Government). *International Journal of Innovation*, 6, 210-231.
- Elkha, F., & Wahidahwati. (2020, Maret). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9, 1-19.
- Esni, M. T., Made, A., & Wulandari, R. (2019, Oktober). Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 7, 1-11. Retrieved from <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma>
- Gustina, I. (2021, Januari-Juni). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10, 56-64.
- Hasugian, F. T., Syahputra, R. A., & Harahap, A. R. (2021, Desember). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Pusat). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 6, 175-185. doi:<https://doi.org/10.51544/jma.v6i2.1997>

- Istikhomah, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Catatan Atas Laporan Keuangan (Studi Kasus Kantor Bakorwil 1 Madiun).
- Jatmiko, B. (2020, September). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7, 231-246.73
doi:<http://dx.doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>.
- Lestari, U. P., & Mutoriqoh. (2020, Mei). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi, Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus OPD Kabupaten Kendal). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 7, 43-53. Retrieved from Journal homepage: <https://journal.feb-uniss.ac.id/home>
- Machmud, M., Kawung, G., & Rompas, W. (2014, Mei). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14, 1-13.
- Muafik, Suyono, N. A., & Susanti. (2021, Desember). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Akuntansi, Manajemen & Perbankan Syariah*, 1, 33-39.
- Murniati, S. (2021, Desember). Analisis Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah. *EQUITY: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 16, 139-148.
- Oktavia, S., & Rahayu, S. (2019, April). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018). *e-Proceeding of Management*, 6, 652-659.
- Priscilla, D., Taufik, T., & Al-Azhar A. (2022, Juni). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penerapan Pengendalian Internal Dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Seluruh OPD di Kabupaten Siak). *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6, 180-190. Retrieved from <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

- Putra, R. I., & Halmawati. (2022, Agustus). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuang Daerah, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4, 589-597. Retrieved from [httpS://Njea.2p6p5j.6u-n3p6.4ac9.i\(dO/innldineex\).php/jea/index](httpS://Njea.2p6p5j.6u-n3p6.4ac9.i(dO/innldineex).php/jea/index)
- Rotinsulu , C. N., Nurnajamuddin , M., Mas'ud, M., & Sudirman . (2021). The Effect Of Budget Participation, Transparency and Internal Control on Accountability and Regional Financial Performance Banggai District. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 296-304.
- S, D. A., Hermadisya, G., Sari, N., & Fitranita , V. (2020). Persepsi Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Pengawasan Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah . *Conference on Economic and Business Innovation* , 1658- 1675.
- Sriwijayanti , H. (2018, April). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Indonesia*, 7, 88-101.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- <https://bk.ngawikab.go.id/profil-2/home/> Diakses Tanggal 24 Desember 2022
- <https://jatim.bpk.go.id/berita-utama/kalan-bpk-jatim-ingatkan-komitmen-pemda-dalam-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan/> Diakses Tanggal 24 Desember 2022
- <https://www.harian7.com/2022/02/selenggarakan-sosialisasi-perbup-kepala.html> Diakses Tanggal 24 Desember 2022
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Keuangan Daerah dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan